

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah beberapa kali dilanda krisis ekonomi, baik krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, maupun krisis global yang terjadi di tahun 2008. Hal tersebut bisa menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Pada tahun 2008-2009 Indonesia mengalami krisis, akan tetapi krisis tersebut terjadi juga pada negara maju dan di negara berkembang lainnya. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 tidak terlepas dari *over spending* pelaku ekonomi di Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Krisis tersebut terjadi karena banyaknya rumah yang disita oleh bank atau lembaga keuangan, hal inilah yang di sebut *suprime mortgage*. Krisis ini dimulai ketika banyaknya kredit perumahan di AS dengan tingkat suku bunga kredit yang rendah. Meningkatnya tingkat resiko yang dibebankan kepada para debitur yang berpendapatan rendah menjadi penyebab dari krisis tersebut. Pada akhir tahun 2006 yang merupakan batas akhir dari pelunasan hutang kredit tersebut, banyak debitur yang berpendapat rendah tidak sanggup membayar hutangnya. Akibatnya, berdampak pada penyitaan dan penutupan yang dilakukan oleh para lembaga keuangan secara dramatis.

Krisis tersebut merupakan akibat dari gagal bayarnya para peminjam yang membuat terjadi kredit macet atau biasa disebut *Non Performing Loan* (NPL). Hal ini membuat sektor perbankan menjadi hal krusial dari suatu sistem keuangan pada suatu negara. Di Indonesia, perbankan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan Nasional. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 Juncto UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa "*perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak*". Bank merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peranan untuk membantuk menggerakkan roda perekonomian negara. Dengan demikian bank mempunyai fungsi utama sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Hal ini yang menjadikan bank sebagai lembaga intermediasi antar pihak. Maka dari itu, sektor perbankan menduduki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi suatu Negara.

Sektor perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan suatu pihak dalam memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan tersebut biasanya dilakukan untuk tujuan bisnis seseorang atau suatu perusahaan. Selain untuk tujuan bisnis, pemberian pembiayaan atau kredit biasa juga digunakan masyarakat untuk memudahkan dalam memenuhi

kebutuhan konsumtifnya. Kegiatan bank sebagai pengalokasian dana merupakan yang paling mendominasi, dikarenakan penyaluran kredit yang dilakukan perbankan mencapai hingga 70-80 % dari total keseluruhan volume usahanya. Oleh karena itu, penyaluran kredit tersebut memiliki bunga yang menjadi sumber utama pendapatan perbankan.

Dengan demikian, sektor perbankan memerlukan pengelolaan yang tepat pada kreditnya. Ketika kredit dari perbankan dikelola dengan kurang baik, maka akan banyak menyebabkan kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*) seperti yang terjadi di Amerika Serikat yang dapat menimbulkan krisis perekonomian negara. *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah yang ada, dapat mengakibatkan pendapatan bunga yang merupakan sumber utama pendapatan perbankan serta pengembalian pokok dari kredit tersebut menjadi menurun yang mengakibatkan kerugian bahkan dapat membuat bank mengalami kebangkrutan. Penilaian terhadap kolektibilitas kredit dapat digolongkan menjadi 5 kelompok, antara lain ; lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub-standard*), diragukan (*doubtful*), serta macet (*loss*). ketika rasio NPL mengalami peningkatan, hal itu menunjukkan bahwa semakin banyaknya debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya. Rasio NPL menjadi pembahasan yang paling krusial di sektor

perbankan dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja suatu bank melalui tingkat profitabilitasnya.

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah menetapkan aturan terkait status perbankan. Di dalam aturannya No.15/2/PBI/2013 Bank Indonesia telah menetapkan salah satu karakteristik bank yang dinilai berpotensi memiliki kesulitan yang bisa menyebabkan dampak negatif bagi kelangsungan usahanya ialah bank yang memiliki risiko kredit yang bermasalah (*Non performing loan*) secara total lebih dari 5% dari total kredit bank tersebut.

Ketetapan BI terkait rasio NPL sebesar 5% pada bank umum, membuat bank umum di Indonesia berusaha mengelola kreditnya dengan sebaik mungkin. Hal ini dibuktikan dengan rasio NPL di Indonesia pada tahun 2008-2012 menunjukkan rata-rata di bawah 5%. Akan tetapi, perlu dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai kredit bermasalah agar tidak menimbulkan masalah terhadap sektor perekonomian lainnya yang dapat memicu terjadi krisis.

Risiko kredit perbankan yang meningkat, biasanya disebabkan oleh beberapa variabel makroekonomi yang dapat memberikan efek terhadap risiko kredit tersebut, seperti inflasi dan kurs. Tingkat inflasi suatu negara merupakan faktor yang menunjukkan kondisi perekonomian negara tersebut. Tingkat inflasi memiliki dampak pada perekonomian dalam negeri yang nantinya akan berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pada dasarnya, tidak semua inflasi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Ketika terjadi inflasi ringan yakni inflasi dengan tingkat dibawah 10%, maka akan memberikan dampak positif berupa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika inflasi suatu negara tinggi bahkan mengalami *hyper* inflasi yakni melebihi 100%, maka akan berdampak sangat buruk bagi perekonomian negara. Inflasi merupakan faktor yang memiliki pengaruh kuat bagi ekonomi, hal ini dikarenakan pengaruh inflasi dapat juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Sehingga pendapatan masyarakat yang rendah akan mengganggu kelancaran sistem perbankan. Hal juga yang dapat menyebabkan sektor perbankan menjadi lemah.

Nilai tukar adalah sejumlah uang yang berasal dari mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu unit mata uang negara lain. Menurut Mankiw (2007 : 128), Kurs (*exchange rate*) adalah tingkat harga yang disepakati penduduk dari dua negara untuk melakukan suatu perdagangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, seperti laju inflasi, investasi asing serta nilai tukar perdagangan suatu negara. Terjadi penurunan nilai tukar mata uang suatu negara, maka akan mengakibatkan resiko pada tingkat kredit di negara tersebut dapat bermasalah. Sehingga dapat memicu terjadi kredit bermasalah atau kredit macet.

Peningkatan jumlah risiko kredit perbankan biasa juga disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dimana dalam hal ini dilihat dari laju pertumbuhan produk domestik bruto. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang telah di produksi di suatu negara selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Pertumbuhan PDB dianggap sebagai suatu simbol dari kemajuan negara. Pertumbuhan PDB ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan seseorang dan perusahaan. Pertumbuhan PDB memiliki pengaruh terhadap tingkat rasio NPL, karena dengan bertumbuhnya PDB maka seseorang atau perusahaan yang memiliki hutang dapat membayar hutang dan membuat rasio NPL menjadi turun. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan pada tingkat PDB, maka dapat membuat seseorang atau perusahaan kesulitan dalam membayar hutangnya.

Krisis ekonomi dapat berdampak pada sektor-sektor utama pada perekonomian Indonesia, seperti sektor finansial, dan sektor rill. Hal tersebut mengakibatkan indikator makroekonomi menjadi sasarannya, seperti laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Laju pertumbuhan PDB di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan.

Pada tahun 2005 tingkat pertumbuhan PDB di Indonesia tumbuh sebesar 5.69% dan pada tahun 2007 laju pertumbuhan PDB

Indonesia sebesar 6.35. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pada laju pertumbuhan PDB di Indonesia dan ketika tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 4.63% dan mengalami peningkatan kembali sebesar 1,59% dari tahun 2009 yang menjadi 6.22%.

Menurut Bank Indonesia, bahwa suku bunga atau *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang menggambarkan sikap (*stance*) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat. *BI rate* akan diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada setiap rapat bulan yang diadakan oleh Dewan Gubernur BI. Kemudian diterapkan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran kebijakan moneter. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor ekonomi lainnya, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan atau menurunkan tingkat *BI rate* dengan melihat tingkat inflasi. Ketika tingkat inflasi yang diperkirakan akan melampaui sasaran yang diterapkan, maka tingkat *BI rate* akan naik. Sebaliknya, apabila diperkirakan tingkat inflasi kedepannya berada dibawah sasaran, maka tingkat *BI rate* akan turun. Tingkat *Bi rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, akan mempengaruhi sektor perekonomian lainnya seperti sektor perbankan.

Tabel 1.1**Data Perkembangan Makroekonomi Di Indonesia**

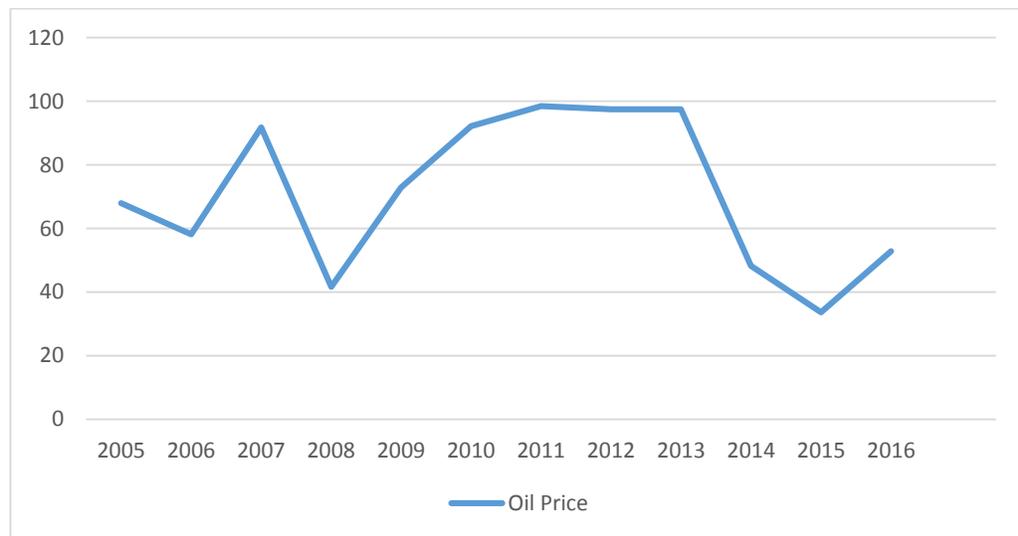
| Indikator Tahun | Rasio NPL (%) | Laju Inflasi (%) | Laju PDB (%) | Kurs (IDR/USD) | BI rate (%) |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 2005 | 2.56 | -0.04 | 5.69 | 9.830 | 12.75 |
| 2006 | 6.07 | 1.21 | 5.50 | 9.620 | 9.75 |
| 2007 | 4.07 | 1.1 | 6.35 | 9.419 | 8.00 |
| 2008 | 3.20 | -0.04 | 6.01 | 10.950 | 9.25 |
| 2009 | 3.31 | 0.33 | 4.63 | 9.400 | 6.50 |
| 2010 | 2.56 | 0.92 | 6.22 | 8.990 | 6.50 |
| 2011 | 2.17 | 0.57 | 6.49 | 9.070 | 6.00 |
| 2012 | 1.86 | 0.54 | 6.26 | 9.670 | 5.75 |
| 2013 | 1.79 | 0.55 | 5.73 | 12.190 | 7.5 |
| 2014 | 2.16 | 2.46 | 5.06 | 12.440 | 7.75 |
| 2015 | 2.82 | 0.96 | 5.17 | 13.800 | 7.5 |
| 2016 | 3.12 | 0.42 | 4.94 | 13.440 | 4.75 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa rasio NPL pada tahun 2006 sebesar 6.07% naik 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2.56%. Hal ini membuat pemerintah untuk bisa waspada terhadap guncangan (*shock*) yang sedang dihadapi. Tingkat nilai tukar rupiah pun mengalami kenaikan pada tahun 2008 ketika terjadi krisis global yang dimana tingkat nilai tukar rupiah atas dollar AS sebesar Rp. 10.950. Laju produk domestik bruto mengalami

laju pertumbuhan yang berfluktuasi secara signifikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016.

Peningkatan risiko kredit perbankan yang bermasalah, dapat juga dipengaruhi oleh variabel eksternal yakni peningkatan harga minyak dunia. Keadaan harga minyak dunia pun merupakan faktor eksternal yang dapat mengganggu perekonomian dalam negara. Hal ini dikarenakan minyak merupakan salah satu komoditas utama yang diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian. Penggunaan minyak sebagai bahan utama untuk menghidupkan kegiatan masyarakat seperti listrik, bahan bakar untuk kendaraan bermotor serta sebagai sumber energi.



Sumber : *www. Investing.com* (2017)

Gambar 1.1

Perkembangan Harga Minyak Dunia

Terjadinya fluktuasi harga minyak yang tidak terkontrol membuat sektor perekonomian negara menjadi imbasnya. Aktivitas spekulasi yang dilakukan beberapa negara dikarenakan khawatir akan kehabisan stok pasokan minyak serta keadaan geopolitik suatu negara, mendorong harga minyak dunia meningkat tajam. Peningkatan harga minyak yang tinggi tersebut, membuat Indonesia harus bisa mengantisipasi guncangan eksternal ini. Ketika tidak diantisipasi dengan baik melalui beberapa kebijakan yang nantinya akan diterapkan, maka akan memunculkan hal negatif bagi sektor perekonomian dalam negeri yang berakibat memburuknya perekonomian negara.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat diketahui bahwa yang paling utama dari perekonomian suatu negara ialah menjaga kestabilan dan ketahanan sistem keuangan. Didalam sistem keuangan yang menjadi hal utama atau tulang punggung ialah sistem perbankan. Fungsi bank yang sebagai perantara keuangan, penyedia jasa-jasa serta likuiditas keuangan dan menjadi transmisi kebijakan moneter. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa kestabilan sistem keuangan dan moneter sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kesehatan sistem perbankan. Untuk mewujudkan sistem perbankan yang lebih kuat, maka diperlukan suatu analisa terhadap sistem perbankan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mengukur kekuatan dan

ketahanan sistem perbankan. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk menganalisa kekuatan sistem perbankan adalah dengan metode *stress test*. Metode ini melakukan evaluasi terhadap hubungan antara kondisi makroekonomi dengan kestabilan sistem perbankan.

Dalam melakukan analisis *stress test* terhadap sistem perbankan pada umumnya difokuskan pada risiko kredit. *Stress test* terhadap sistem perbankan mencakup beberapa hal, antara lain; (1) analisa pengaruh variabel-variabel yang menjadi amatan dan berkaitan terhadap kualitas kredit perbankan, (2) menyusun skenario *stress* yang akan digunakan nanti dalam analisa *stress testing*, (3) menghitung risiko kredit dan cadangan terhadap potensi kerugian dalam kondisi *stress* yang sesuai dengan skenario yang telah disusun (Otani et al, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji variabel-variabel yang menjadi amatan dan atau memiliki pengaruh terhadap sistem perbankan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pengaruh NPL terhadap perekonomian yang ada di Indonesia dengan penelitian yang berjudul : **“Analisis *Macro Stress Testing* terhadap Perbankan di Indonesia”**.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan identifikasi transmisi risiko sistemik perlu dibuat pola yang lebih umum. Secara garis besar terdapat 4 elemen utama dalam melakukan identifikasi transmisi risiko sistemik, yakni: (i) adanya gangguan (*shock*) sebagai *trigger event*, (ii) penyebaran gangguan (*propagation mechanism*) baik dalam sistem keuangan maupun sektor riil, (iii) adanya kejadian yang berdampak sistemik (*systemic event*), serta (iv) dampak yang ditimbulkan (*cumulative loss*). Tetapi agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah penyebaran gangguan (*propagation mechanism*), karena pada masalah inilah perlu digunakannya *stress test*. Pada masalah *propagation mechanism* ini, sistem keuangan mengalami guncangan, maka bisa diidentifikasi melalui tiga tahapan, dengan alat ukur yang berbeda-beda. Pertama adalah tahapan *build up* dengan gejala *overheating* pada sistem keuangan yang ditandai dengan *boom* (harga) aset, pertumbuhan kredit yang konsisten tinggi, atau perkembangan *financial innovation* yang cepat. Kedua adalah tahapan *shock materialized*, tahap ini merupakan tahap awal krisis yang ditandai dengan munculnya tekanan (*shock*) pada sistem keuangan. Ketiga adalah tahapan *amplification and propagation* yang merupakan meluasnya dampak krisis, baik antara institusi keuangan, pasar keuangan, maupun sektor lain, bahkan hingga sistem keuangan negara lain.

Tabel 1.2

Metode Pengukuran Risiko Sistemik

| Tahapan | Metode Pengukuran / Penilaian |
|--|--|
| <i>Build up</i> | 1. Probabilitas terjadinya krisis 2. <i>Early warning indicator</i> |
| <i>Shock materialized</i> (<i>systemic event</i>) | 1. <i>Loss given default</i> 2. <i>Stress Testing</i> |
| <i>Amplification and propagation</i> | 1. Analisis dampak sistemik 2. <i>Contagion analysis</i> |

Sumber : Bank Indonesia 2015

Dari tabel 1.2 diatas maka penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam ruang lingkup *shock materialized* karena dalam tahapan inilah merupakan fase awal krisis yang ditandai dengan munculnya guncangan (*shock*) pada sistem keuangan. Alat ukur pada tahapan ini difokuskan pada asesmen terhadap potensi kerugian dalam sistem keuangan maupun sektor riil dengan asumsi terjadi stres atau kegagalan. Metode penilaian yang telah mulai banyak digunakan oleh otoritas keuangan maupun intitusi keuangan dalam mengukur selisih dari potensi kerugian dalam kondisi stres atau default terhadap kemampuan untuk menyerap risiko yang diwakili oleh *buffer* likuiditas atau permodalan. Metodologi yang telah sering

diimplementasikan oleh otoritas keuangan dari institusi keuangan untuk mengukur risiko sistemik jika sistem keuangan memasuki tahapan *shock materialized* adalah metode *loss given default* atau model *stress testing*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan, dapat dilihat kegagalan sistem keuangan di Indonesia seperti krisis perbankan yang seringkali memberikan dampak buruk dan rasa trauma terhadap perekonomian serta seluruh elemen sosial di Indonesia. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap sistem perbankan yang ada di Indonesia. menggunakan analisis *macro stress testing* dalam merumuskan penelitian ini dan rumusan masalah yaitu :

1. Seberapa besar guncangan (*shock*) faktor makroekonomi terhadap *Non Performing Loan* di Indonesia ?
2. Seberapa besar respon *Non Performing Loan* terhadap guncangan simultan (*multiple shocks simultaneously*) variabel makroekonomi di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini, maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh guncangan (*shock*) faktor makroekonomi terhadap *Non Performing Loan* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui besaran respon *Non Performing Loan* terhadap guncangan simultan (*multiple shocks simultaneously*) variabel makroekonomi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada diatas, maka peneliti berharap penelitian ini akan memberikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian mengenal analisis *macro stress testing* pada perekonomian di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan bagi para pihak-pihak terkait guna sebagai :
 - a. Bukti empiris mengenai tingkat ketahanan makroekonomi yang diukur dengan analisis *stress testing*.
 - b. Mengoptimalkan tingkat ketahanan ekonomi ketika menghadapi guncangan dengan menggunakan skenario.
 - c. Bagi pihak pemerintah dan atau Bank Indonesia, dari analisis *macro stress testing* ini dapat memberikan gambaran terkait kondisi perekonomian bila diterpa

krisis sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi atau kebijakan ekonomi kedepannya.